

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI  
TERHADAP DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI BALI**

**Ni Putu Intan Primandani<sup>1</sup>  
I Nyoman Mahaendra Yasa<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

<sup>1</sup>email: [primandani@gmail.com](mailto:primandani@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan sumber-sumber pembiayaan, serta membutuhkan komitmen kuat dari pihak pemerintah dan swasta dalam hal investasi. Walaupun kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali meningkat, namun peningkatan cenderung rendah dan masih terjadi disparitas distribusi pendapatan antar daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap disparitas distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu data *time series* yang dimulai tahun 2013-2018. Penelitian ini dilakukan melalui observasi non partisipan pada publikasi BPS. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur atau *path analysis*. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan disparitas distribusi pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah dan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

**Kata Kunci:** pengeluaran pemerintah, investasi, disparitas distribusi pendapatan, kesejahteraan masyarakat.

**ABSTRACT**

*Community welfare is the goal of development. In achieving these objectives, funding sources are needed, and require strong commitment from the government and the private sector in terms of investment. The purpose of this study is to analyze the effect of government spending and investment on the disparity in the distribution of income and welfare of the district / city community in the Province of Bali. This study was sourced from secondary data, namely time series data which began in 2013-2018. This research was conducted through non-participant observation in BPS publications. The analysis technique used is path analysis. Based on the analysis, the results show that government spending has a negative and significant effect, while investment has a positive and not significant effect on the disparity in the income distribution of regencies / cities in Bali Province. Government expenditure and investment have a positive and significant effect, while the disparity in income distribution has a positive and not significant effect on the welfare of the district / city community in Bali Province. Government expenditure and investment do not indirectly affect the welfare of the community through disparity in the distribution of district / city income in the Province of Bali.*

**Keywords:** government expenditure, investment, disparity in income distribution, public welfare.

**PENDAHULUAN**

Pada dasarnya suatu pembangunan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerahnya melalui pembangunan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan baik antar sektor maupun antar sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah yang efisien. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dapat tercermin dari bagaimana kondisi masyarakatnya baik dari segi ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan suatu konsep utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hokum, 2014). Menurut Nehen (2012:78) pembangunan manusia diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi pemenuhan dasar manusia dari sisi ekonomi (daya beli), kesehatan maupun pendidikan. Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan di suatu daerah serta pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk merubah sumber daya manusia yang potensial. Pada kenyataannya selama ini pembangunan hanya ditujukan untuk pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, bukan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Jadi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila suatu daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial.

Pemerintah Provinsi Bali tentu saja harus berupaya melakukan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat membantu mengoptimalkan peran dari masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Bali. Nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam kurun waktu enam tahun secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun terdapat perbedaan angka IPM yang cukup jauh antara kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut menunjukkan terjadi ketidakmerataan antar daerah.

**Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (dalam poin)**

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	68,39	68,67	69,66	70,38	70,72	71,65
Tabanan	72,31	72,68	73,54	74,19	74,86	75,45
Badung	77,63	77,98	78,86	79,80	80,54	80,87
Gianyar	74,00	74,29	75,03	75,70	76,09	76,61
Klungkung	68,08	68,30	68,98	69,31	70,13	70,90
Bangli	65,47	65,75	66,24	67,03	68,24	68,98
Karangasem	63,70	64,01	64,68	65,23	65,57	66,49
Buleleng	68,83	69,19	70,03	70,65	71,11	71,70
Denpasar	81,32	81,65	82,24	82,58	83,01	83,30
Bali	72,09	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77

*Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019*

Tabel 1 menunjukkan bahwa IPM Provinsi Bali mengalami peningkatan dari 72,09 poin pada tahun 2013 menjadi 74,77 poin pada tahun 2018. Rentanga IPM yang dikategorikan menengah ke atas hanya dimiliki oleh empat kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Selain itu terdapat lima kabupaten yang memiliki angka IPM dibawah IPM Provinsi Bali. Hal ini diduga masih terjadi disparitas distribusi pendapatan sehingga pembangunannya belum merata.

Ketidakmerataan pembangunan disuatu daerah akan menyebabkan disparitas distribusi pendapatan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan geografis, perbedaan kualitas sumber daya manusia, persebaran investasi yang tidak merata, pengalokasian belanja pemerintah yang belum efektif serta strategi pembangunan daerah masih kurang. Pelebaran kesenjangan antar daerah sangat dipengaruhi akibat perbedaan geografis seperti halnya ketimpangan antara daerah perkotaan dengan pedesaan (Breau dan Saillant, 2016). Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah karena sektor-sektor utama daerah hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja.

Investasi swasta memiliki peran penting dalam pola pembangunan daerah dalam mengembangkan sektor-sektor yang ada di suatu daerah. Investasi merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian suatu daerah karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan ekonomi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Meningkatnya kegiatan investasi atau penanaman modal di suatu daerah diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya kegiatan investasi tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pada akhirnya mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan (Awandari, 2016).

Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan berdampak

terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah sebagai indikator untuk meningkatkan kegiatan perekonomian disuatu daerah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang paling efektif dan digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu daerah. Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi dapat menciptakan kesempatan kerja akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap disparitas distribusi pendapatan di Provinsi Bali. 2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan disparitas distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. 3. Apakah pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan studi empiris sehingga menambah generalisasi hasil studi sebelumnya dan menambah bukti-bukti untuk memperkuat teori dan juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan bidang pembangunan regional khususnya mengenai pengeluaran pemerintah, investasi, disparitas distribusi pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, pengeluaran, dan pembiayaan daerah. Dalam teori Wagner bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam penelitian Wicaksono (2018) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan. Pengeluaran pemerintah menjadi suntikkan perekonomian melalui program-program untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga mampu mengurangi disparitas distribusi pendapatan yang terjadi di suatu wilayah (Dyatmika dan Hastarini, 2013). Menurut Baeti (2013) pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, di era otonomi pemerintah daerah harus semakin mendekati diri pada pelayanan dasar masyarakat. Alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan memegang peranan penting guna meningkatkan pelayanan ini

Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal merupakan komponen yang penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian di suatu daerah. Peran investasi asing langsung untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dianggap lebih baik dari investasi domestik (Fazaalloh, 2019).

Investasi ataupun penanaman modal dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian atau dapat berasal dari 2 sumber yaitu :

1) Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*Direct Investment*) maupun investasi tidak langsung (Portofolio).

2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda, baik yang dimiliki swasta ataupun warga asing yang berdomisili di Indonesia, yang disediakan guna menjalankan suatu usaha jangka panjang. Penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan kekayaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut ketentuan undang-undang penanaman modal.

Berdasarkan teori Harrod Domar, ada korelasi positif antara investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat diartikan bahwa kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi yang produktif dan mengakibatkan ketimpangan pendapatan semakin melebar. Hartini (2017) menyatakan ada hubungan negatif terhadap disparitas distribusi pendapatan, sedangkan hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, Suciati (2015) dan Wahyuningsih (2012) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat

menyerap tenaga kerja sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Terpusatnya investasi di suatu wilayah, maka ketimpangan distribusi investasi ini dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan ketimpangan pembangunan.

Disparitas pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat. Kesenjangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan masing-masing daerah (Yasa dan Arka, 2015). Teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai dari munculnya hipotesa terkenal yaitu hipotesa U terbalik oleh Simon Kuznet tahun 1955 yang berpendapat bahwa mula ketika pembangunan dimulai distribusi pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur pemerataan distribusi pendapatan, salah satunya yaitu indeks *gini rasio* atau rasio gini. Adapun nilai *gini rasio* berkisar antara 0 dan 1, jika:

- 1)  $G < 0,3$  —→ ketimpangan rendah
- 2)  $0,3 \leq G \leq 0,5$  —→ ketimpangan sedang
- 3)  $G > 0,5$  —→ ketimpangan tinggi

Menurut Alesina dan Rodric (dalam Sholihah dkk., 2017) mengemukakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah akan mengalami penurunan. Sejalan dengan Hipziwaty dkk (2019) dan Yasa (2015)

menyimpulkan bahwa disparitas distribusi pendapatan memiliki korelasi negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya ketimpangan pendapatan antar daerah tentunya akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya sehingga masyarakat bisa mencapai kesejahteraan hidupnya.

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad, 2010:11). Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakatnya, dimana kesejahteraan diukur melalui beberapa indikator lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonominya (Widyastuti, 2012). Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek sebagai berikut.

- 1) Dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (*somatic status*), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya
- 2) Dengan melihat pada tingkat mentalnya, (*mental/educational status*) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya
- 3) Dengan melihat pada integrasi dan kedudukan sosial (*social status*).

Untuk melihat keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM menggambarkan tiga indeks pengukuran yaitu Indeks Harapan Hidup, Indeks

Pengetahuan dan Indeks Pendapatan (Jember dan Yogi, 2011). Pembentukan modal manusia merupakan suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan pembangunan suatu negara. Adapun metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari yaitu tingkat kesehatan yang diukur dengan harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan standar kehidupan yang diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
2. Pengeluaran pemerintah, investasi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan disparitas distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.
3. Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Lokasi ini di pilih karena melihat beberapa kabupaten memiliki nilai IPM dibawah nilai IPM Provinsi Bali dan diduga masih terjadi disparitas distribusi pendapatan antar kabupaten. Hal ini

tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali secara menyeluruh.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengeluaran pemerintah, investasi, disparitas distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pengeluaran pemerintah ( $X_1$ ) dan investasi ( $X_2$ ). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah disparitas distribusi pendapatan ( $Y_1$ ).

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder tahun 2013-2018. Data sekunder digunakan karena penelitian yang dilakukan meliputi objek yang bersifat makro dan mudah di dapat. Adapun data yang digunakan antara lain data pengeluaran pemerintah, investasi, disparitas distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi non partisipan yaitu dengan cara analisis catatan, mempelajari uraian dari buku-buku, jurnal-jurnal, situs internet, skripsi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh dasar teoritis dan acuan untuk memperoleh data.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, untuk hubungan kausalitas antar variabel yang ditunjukkan oleh anak panah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan independen terhadap variabel dependen dan hubungan yang tidak langsung melalui variabel intervening.

Terdapat dua persamaan struktual yang digunakan dalam menghitung koefisien jalur untuk menunjukkan hubungan dalam hipotesis, yaitu:

Struktur I

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

Struktur II

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- $Y_1$  : Disparitas distribusi Pendapatan
- $Y_2$  : Kesejahteraan Masyarakat
- $X_1$  : Pengeluaran Pemerintah
- $X_2$  : Investasi
- $e_1, e_2$  : Error
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  : Koefisien Regresi Untuk Masing-masing Variabel

Nilai kekeliruan taksiran standar (*standard error of estimate*), yaitu:

Struktur I

$$e_1 = \sqrt{1 - R_1^2} \dots \dots \dots (3)$$

Struktur II

$$e_2 = \sqrt{1 - R_2^2} \dots \dots \dots (4)$$

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan :

$$R_m^2 = 1 - e_1^2 e_2^2 \dots \dots \dots (5)$$

Pengujian signifikansi

Dari hal yang dikemukakan diatas maka ditentukan hipotesis penelitian dengan menggunakan analisis jalur, pengujian yang dilakukan adalah pengujian pengaruh langsung terhadap persamaan struktual I dan persamaan struktual II. Pengujian pengaruh langsung persamaan struktual I dilakukan untuk mengetahui

pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap distribusi pendapatan, dengan taraf nyata  $\alpha = 5$  persen (0,05). Pengujian pengaruh langsung persamaan struktural II dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan disparitas distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan taraf nyata  $\alpha = 5$  persen (0,05). Pengujian pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah ( $X_1$ ) dan investasi ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) melalui disparitas distribusi pendapatan ( $Y_1$ ) yang diukur melalui uji sobel. Pengujian variabel mediasi dikenal dengan uji sobel (Sobel, 1982 dalam Suyana, 2016:169).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan-hubungan antar variabel penelitian, yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Pengujian data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*). Untuk dapat menyusun persamaan struktural yang digunakan, maka terlebih dahulu data yang diperoleh kemudian diolah dan dihitung menggunakan program SPSS versi 23 sehingga diperoleh hasil analisis seperti pada Tabel 2.

**Tabel 2 Hasil *Coefficients* Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan**

		Coefficients <sup>a</sup>			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t Sig.
1	(Constant)	0,186	0,262		0,711 0,480
	Pengeluaran Pemerintah	-0,080	0,032	-0,447	-2,511 0,015
	Investasi	0,014	0,009	0,285	1,601 0,116

a. Dependent Variable: Disparitas Distribusi Pendapatan

Sumber: Lampiran 3

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah terhadap disparitas distribusi pendapatan memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,015 < 0,05$  (nilai alpha), memiliki arti bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan. Hasil pengujian investasi terhadap disparitas distribusi pendapatan dengan signifikansi sebesar  $0,116 > 0,05$  (nilai alpha), memiliki arti bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan. Maka persamaan struktualnya adalah:

$$Y_1 = -0,447X_1 + 0,285X_2 + e_1$$

Pengujian persamaan struktual II dilakukan untuk melihat pengaruh langsung pengeluaran pemerintah, investasi, dan disparitas distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3 Hasil *Coefficients* Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Disparitas Distribusi Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,136	0,162		7,000	0,000
	Pengeluaran Pemerintah	0,074	0,021	0,473	3,550	0,001
	Investasi	0,015	0,005	0,359	2,787	0,007
	Disparitas Distribusi Pendapatan	0,089	0,086	0,102	1,027	0,310

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Lampiran 4

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dengan nilai signifikansi yaitu  $0,001 < 0,05$  (nilai alpha) memiliki arti bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel investasi dengan nilai signifikansi yaitu  $0,007 < 0,05$  (nilai alpha) memiliki

arti bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, disparitas distribusi pendapatan dengan nilai signifikansi sebesar 0,310 > 0,05 (nilai alpha) memiliki arti bahwa disparitas distribusi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka persamaan struktualnya adalah:

$$Y_2 = 0,473X_1 + 0,359X_2 + 0,102Y_1 + e_2$$

Nilai kekeliruan taksiran standar  $e_1$  menunjukkan jumlah *variance* variabel kesejahteraan masyarakat yang tidak dijelaskan oleh pengeluaran pemerintah dan investasi, setelah dilakukan perhitungan dengan rumus yang telah dijelaskan diatas untuk menghitung nilai kekeliruan taksiran standar maka diperoleh hasil  $e_1 = 0,94$ . Sedangkan nilai  $e_2$  yang menunjukkan jumlah *variance* variabel kesejahteraan masyarakat yang tidak dijelaskan oleh pengeluaran pemerintah dan investasi, dan disparitas distribusi pendapatan, setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil nilai  $e_2$  sebesar 0,66.

Untuk memeriksa validitas model terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat disajikan oleh model adalah sebesar 61,3 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 61,3 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 39,7 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.



sebesar 0,473. Nilai pengaruh langsung investasi terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,359 dan nilai pengaruh langsung disparitas distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,102. Nilai pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas distribusi pendapatan sebesar -0,046. Nilai pengaruh tidak langsung investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas distribusi pendapatan sebesar 0,029.

### **1) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan**

Hasil pengujian statistik dengan SPSS menunjukkan tingkat signifikansi pengeluaran pemerintah sebesar  $0,015 < 0,05$  sehingga membuktikan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2018) dimana pengeluaran pemerintah memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan, dengan demikian hipotesis pertama berhasil didukung. Hal ini berarti pengalokasian pengeluaran pemerintah yang tepat mampu menurunkan tingkat disparitas distribusi pendapatan.

Pengeluaran pemerintah menjadi suntikkan perekonomian melalui program-program atau kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang tersedia. Misalnya pengeluaran pemerintah menjadi pendorong produktivitas unit-unit usaha di daerah tersebut karena output yang dihasilkan oleh industri besar maupun UMKM akan lebih banyak terserap, sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat serta membantu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah. Pengalokasian anggaran infrastruktur juga sangat penting dalam

memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi karena menjadi mesin utama dalam pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang merata akan memberikan kontribusi dalam mengurangi akan memberikan kontribusi dalam mengurangi ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.

## **2) Pengaruh Investasi Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan**

Hasil analisis memperoleh nilai signifikansi variabel investasi sebesar 0,116 > 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa variabel investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pradnyadewi (2017) yang menyatakan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan di Provinsi Bali 2004-2015. Investasi yang tinggi di suatu daerah tidak dapat mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali karena untuk mencapai angka disparitas yang rendah diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta.

Investasi yang tinggi di suatu daerah tidak dapat mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali karena lokasi realisasi penanaman modal masih dominan berpusat di wilayah Bali bagian selatan. Upaya untuk mengurangi dampak kesenjangan tersebut dengan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya tak hanya di sekitar Bali bagian selatan tetapi di Bali bagian barat, timur, ataupun utara. Hanya daerah yang mendapat profit yang menjanjikan yang akan dilirik oleh para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri.

### 3) **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, nilai beta pada *standardized coefficient* sebesar 0,473 sehingga berpengaruh positif. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Adolf Wagner yang menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Baeti (2012) dimana pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di era otonomi, pemerintah daerah khususnya Provinsi Bali harus semakin mendekatkan diri pada pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan memegang peranan penting guna meningkatkan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum atau program-program langsung yang dapat merangsang produktivitas yang lebih besar bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah. Dengan alokasi belanja daerah yang tepat maka pembenahan infrastruktur daerah serta fasilitas umum akan tetap baik, sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitasnya serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4) Pengaruh Investasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel investasi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, nilai beta pada *standardized coefficient* sebesar 0,359 sehingga berpengaruh positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suciati (2015) dan Wahyuningsih (2012), dimana investasi memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori investasi Harrod-Domar investasi tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Semakin banyaknya investasi di suatu daerah akan berhubungan ketersediaan lapangan kerja yang baru karena akan memunculkan kegiatan produksi yang meningkat sehingga masyarakat yang terserap akan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### **5) Pengaruh Disparitas Distribusi Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Hasil analisis memperoleh nilai signifikansi variabel investasi sebesar 0,310  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa variabel disparitas distribusi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya pelebaran kesenjangan pendapatan tidak menjadikan kesejahteraan masyarakat menurun, bisa dikatakan angka gini rasio

kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak terlalu timpang dan masih dalam kategori ketimpangan sedang (kurang dari 0,5), namun memiliki hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya terlihat semakin besar ketimpangan (gap) kesejahteraan antara masyarakat golongan atas dan menengah kebawah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholilah yang menyatakan bahwa kesenjangan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak dibarengi dengan pemerataan pendidikan dan teknologi.

#### 6) Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Uji mediasi variabel disparitas distribusi pendapatan ( $Y_1$ ) atas pengaruh pengeluaran pemerintah ( $X_1$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) sebagai berikut:

Perhitungan

$$S_{\beta_1 \beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_1 \beta_5} = \sqrt{(0,089)^2 (0,032)^2 + (-0,080)^2 (0,086)^2}$$

$$S_{\beta_1 \beta_5} = 0,007$$

Berdasarkan perhitungan diatas, untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka harus menghitung nilai z (uji t-hitung) dari koefisien  $S_{\beta_1 \beta_5}$  dengan rumus sebagai berikut

$$Z = \frac{\beta_1 \beta_5}{S_{\beta_1 \beta_5}}$$

$$Z = \frac{(-0,080)(0,089)}{0,007}$$

$$Z = -1,017$$

Oleh karena  $z$  hitung sebesar  $-1,017 > -1,96$ . Artinya pengeluaran pemerintah ( $X_1$ ) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) melalui disparitas distribusi pendapatan ( $Y_1$ ).

Uji mediasi variabel disparitas distribusi pendapatan ( $Y_1$ ) atas investasi ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) sebagai berikut:

Perhitungan

$$S_{\beta_2 \beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_2}^2 + \beta_2^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_2 \beta_5} = \sqrt{(0,089)^2(0,009)^2 + (-0,014)^2(0,086)^2}$$

$$S_{\beta_2 \beta_5} = 0,001$$

Berdasarkan perhitungan diatas, untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka harus menghitung nilai  $z$  (uji t-hitung) dari koefisien  $S_{\beta_1\beta_5}$  dengan rumus sebagai berikut

$$Z = \frac{\beta_2 \beta_5}{S_{\beta_2 \beta_5}}$$

$$Z = \frac{(0,014)(0,089)}{0,001}$$

$$Z = 1,246$$

Oleh karena  $Z$  hitung sebesar  $1,246 < 1,96$ . Artinya investasi ( $X_2$ ) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) melalui disparitas distribusi pendapatan ( $Y_1$ ).

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh disparitas distribusi pendapatan bukan merupakan variabel intervening pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wahyuni dkk (2014) yang menyatakan bahwa alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk

mengurangi ketimpangan ekonomi tampaknya lebih perlu diperhatikan. pengalokasian pengeluaran pemerintah belum terbilang efektif dalam menurunkan disparitas distribusi pendapatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena pengalokasian pengeluaran pemerintah yang tepat diharapkan mampu menyejahterakan masyarakatnya secara merata.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh disparitas distribusi pendapatan bukan merupakan variabel intervening investasi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yolanda dkk (2017) yang menyatakan bahwa investasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berupa sumber nafkah atau pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan. Investasi juga menghasilkan nilai tambah yang merupakan balas jasa produksi, sekaligus sebagai sumber pendapatan atau kesejahteraan masyarakat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan disparitas distribusi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah dan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan

masyarakat melalui disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pemerintah harus meningkatkan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap pembenahan infrastruktur kabupaten/kota di Provinsi Bali. Saat ini infrastruktur yang memadai masih dominan di wilayah Bali bagian selatan, sedangkan daerah lainnya belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah untuk penyediaan fasilitas publik ini. Pemerintah Provinsi Bali juga diharapkan memencarkan pusat pertumbuhan ekonomi pada semua kabupaten/kota di Provinsi Bali. Perkembangan investasi yang dominan di daerah Bali bagian selatan mengakibatkan pembangunan ekonomi hanya terpusat di daerah tersebut, sehingga pertumbuhan penduduk di daerah tersebut sangat tinggi. Pembangunan pusat pertumbuhan harus mempertimbangkan potensi-potensi unggulan yang dimiliki masing-masing daerah. Pemencaran pusat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan akan mengurangi disparitas distribusi pendapatan

Melalui investasi tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan yang muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Bali harus mempersiapkan sumber daya manusianya sesuai kebutuhan dan memperbaiki berkualitas SDMnya. Melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan suatu negara khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Peningkatan kualitas SDM juga berdampak pada tingkat produktivitas dan tingkat pendapatan yang diterima. Pelayanan dasar lainnya yang perlu mendapat perhatian

pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu alokasi anggaran pemerintah di bidang pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan agar memprioritaskan pemerataan dalam aspek distribusi pendapatan serta pengalokasian infrastruktur dan investasi pada setiap daerah secara merata, selain itu diharapkan lebih intensif melaksanakan upaya pemerataan distribusi pendapatan serta pembangunan manusia.

## REFERENSI

- Adipuryanti, dan Ketut Sudibia. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, 11(1). ISSN: 1907-3275. Hal 60-65.
- Aidar, Nur. (2015). Analisis Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh. Jawa Tengah. *E-Journal of Economics*.1(1).ISSN (Print): 2337-3814. Hal 160-161.
- Akudugu, Jonas Ayaribilla. (2012). Accountability in local Government revenue management: who does what?.*Journal of Sustainable Development*.
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah. Lombok: SNA 17 Mataram, Lombok. UniversitasMataram. Diunduh dari website :[www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id](http://www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id).
- Arsyad, Lincolin. (2005). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Stie Ykpn.
- Atje, AswicaHyono, Haryo, Raimond dan Thee Kian Wie. (2005). *Indonesia's Industrial Competitiveness: A Study of the Garment, Auto Parts and Electronic Component Industries. Report Submitted to the Development Economics Research Group*.The World Bank.
- Awandari Putri dan I Gst Bgs Indrajaya. (2016). Pengaruh Infrastuktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui

Kesempatan Kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 5 No. 12, tahun 2016. Universitas Udayana. ISSN: 2303-0178. Hal:1436-1437

Azizah, Nur. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Kabupaten Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi.S1 Sarjana Ekonomi Universitas Hasanuddin*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2007). *Analisis Pengaruh Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan*. ISBN : 978-979-064-129-7.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2013). Bali Dalam Angka. Denpasar.

\_\_\_\_\_. (2014). Bali Dalam Angka. Denpasar.

\_\_\_\_\_. (2015). Bali Dalam Angka. Denpasar.

\_\_\_\_\_. (2016). Bali Dalam Angka. Denpasar.

\_\_\_\_\_. (2017). Bali Dalam Angka. Denpasar.

\_\_\_\_\_. (2018). Bali Dalam Angka. Denpasar.

Baeti, Nur. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economic Development Analysis Journal*.2(3).ISSN 2252-6889. Hal 85-94.

Batarseh, I.A and Ananzeh, N.E. (2015). The Causal Relationship Among Foreign Direct Investasiment, Domestic Saving and Economic Growth in Jordan during the Period 1975 – 2013. *International Journal of Bussiness and Management*.10(1). pp: 73 -79.

Bintarto. (1989). Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia

Breau, Sebastien, dan Richard Saillant. (2016). Regional Income Disparities in Canada: Exploring the Geographical Dimensions of an Old Debate. *Journal Regional Studies, Regional Science*, Vol. 3. Hal 463-481.

Chalid, Nursiah dan Yusbar Yusuf. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*.Hal. 65-67.

Constantini, Valeria dan Salvatore Monni. (2005). Suitainable Human Developmnet for European Countries. *Journal of Human Development*, Vol. 6, No. 3.

Danawati, I K G. Bendesa, dan Made Suryana Utama. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja,

- Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Bali.*E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.5(7). Hal 2124-2125. ISSN: 2337-3067.
- Dalamagas, Basil. (2010). *Publik Sektor and Economic Growth: The Greek Experience. Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32, Hal:277-288.
- Dewi, Putu Ayu Krisna dan I Ketut Sutrisna. (2014). Pengaruh kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.*E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 4(1). Hal 33-35. ISSN: 2303-0178.
- Dyatmika, Wahyu dan Hastarini Dwi Atmanti. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro*. 2(2).SSN (Online): 2337-3814.
- Erwin, Nyoman Djinar Setiawan, Ketut Djayastra. (2014). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.*E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.3(3). Hal 141-142.
- Fazaalloh, Al Muizzuddin. (2019). Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Suatu Analisis Kausalitas. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 12(1).pISSN: 2301 – 8968. Hal 47-54.
- Fajrin, Verawati. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Madura.*Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 9(1).p-ISSN: 2089-4473.e-ISSN: 2541-1314. Hal 23.
- Ginting S, Charisma Kuriata, Irsad Lubis, Dan Kasyful Mahalli. (2008). Pembangunan Manusia Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*. 4(1). Hal 17-24.
- Haq, M.U. (1996), *Reflections on Human Development*, 1st Edition. New York: Oxford UniversityPress.
- Hartini, Nita Tri. (2017). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi,dan IPM Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.6(6). Hal 530-535.
- Hipziwaty, Baiq, Putu Karismawan, dan Baiq Ismiwaty. (2019). Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi UNRAM*. 13(1). ISSN 2615-8116. Hal 68.

- Hokum, Alexandra. (2014). Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 7(2). Hal 120-129.
- Irawan, Andi. (2015). *Regional Income Disparities In Indonesia: Measurements Convergence Process, And Decentralisation*. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*. ISSN: 0007-4918.
- Jember, I Made dan Yogi Swara. (2011). Kemiskinan Di Bali. *Jurnal Piramida*, 7(2). Hal 8-10. ISSN 2685-788X
- Lindblad, J. Thomas. (2015). *Foreign Direct Investment In Indonesia : Fifty Years Of Discourse*. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 51(2) : 217-273.
- Mirza, Denni Sulistio. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.1(1). Hal 2-4. ISSN 2252-6560.
- Mustika, Setyadhi Dwi. (2013). Analisis Disparitas Pendapatan Pedagang Makanan Gerobak Dorong Antar Kecamatan di Kota Denpasar. *Jurnal Piramida*. 9(2). ISSN : 1907-3275. Hal 89-94.
- Musfidar, Ma'mun. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Melliana, Ayunandan dan Zain, Ismaini. (2013). Analisis Atatistik Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*, 2(2). Hal 237-242.
- Nehen.Ketut. (2012). *Perekonomian Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press.
- Nurudeen, Abu dan Usman, Abdullah. (2010). "Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970 – 2008: A Disaggregated Analysis" *Business and Economic Journal* , June.
- Oates, W. (1993) *.Fiscal Decentralization and Economic Development, National Tax Journal*. XLVI. Hal, 237-243.
- Orisu,Lillyani Margaretha. (2014). Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari. *Jurnal Ekonomi Cita Ekonomika*.3(1).ISSN: 1978-3612. Hal:7
- Oqujiuba, Kanayo and Abraham, Terfa W. (2012). Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure:Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics Finance*, 4(11), Hal: 172-182.

- Panca, Kurniasih Erni. (2017). *Effect Of Economic Growth on Income Inequality, Labour Absorption, and Welfare*. 9(2). Hal 181-188.
- Prasetya, Ferry. (2012). *Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah*. Modul Ekonomi Publik. Universitas Brwijaya.
- Pradnyadewi, Diah dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Hal 259-26.
- Puntri, Ado Gagarina. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Tahun 2011-2013). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahmat, David dan Nasri Bachtiar. (2015). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Andalas, Padang.
- Ranis, Gustav, Stewart, Frances, & Samman, Emma. (2006). Human Development: Beyond the Human Development Index. *Journal of Human Development Index*. Hal:23-28. 7(3).
- Rosmeli. (2015). Dampak Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 1(2). Hal: 363-364.
- Rosni. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*. 9(1). p- ISSN: 2085–8167. Hal 53-54
- Sarungu J.J , Maharsi Endah. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia tahun 1990-2010: Metode EC. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 6(2). ISSN : 2301 – 8968. Hal 112-117.
- Sasana, Hadi. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. 25(1). Hal 5-8. ISSN : 0854-1442.

- Sholihah, Fitriyatus dan Munari Kustanto. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo. *Seminar Nasional & Call For Paper*, FEB Unikama.
- Suciati, Desak dan Budhi, M. K. S. (2014). Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan Dan investasi Pada Kesejahteraan Masyarakat Melalui belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali tahun 2007-2012. *Buletin Studi Ekonomi*, ISSN 2580-5312. Hal 30.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Tambunan Mangara. (2010). *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan; Menggerakkan Kekuatan Lokal dalam Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Taufik, Eny dan Fitriadi. (2015). Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerahan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 7(2). ISSN: 2031-8968. Hal 90-92.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta : Erlangga.
- Todaro. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesebelas, jilid I)*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyuningsih, Tri. (2012). Dampak Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 8(2). Hal 16.
- Wahyuni, Putri, Made Sukarna dan Nyoman Yuliarmi. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3 (8), hal.458-477. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

- Wicaksono, Tulus Dedy. (2018). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015. *Skripsi*. S1 Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta.
- Widyastuti, Astriana. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009. *Journal Unnes*. 1(2). Hal 2-3. ISSN 2252-6560.
- Woolcock, M. dan Narayan, D. (2000). *Social Capital: Implications for Development, Theory, Research, and Policy*. The World Bank Research Observer, 15(2): 225-249
- Yasa, Oka Artana dan Sudarsana Arka. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan antar daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8(1). Hal 130-131. ISSN: 2303-0178.
- Yeniwati. (2013). Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi*. 2(3). Hal 8-10.
- Yolanda, Vecky A.J Masinambouw dan Tri Oldy Rotinsulu. (2017). Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. 19(3). Hal 14-15.
- Zahari, M MS. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *Jurnal of Economics and Business*. 1(1). Hal 187.
- Zasriati, Masrida. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Hal 1-3.
- Zamharir, Amirul. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah Minimum Terhadap *Human Development Index*: Studi Kasus 12 Provinsi dengan Kategori *Lower Medium* di Indonesia. *Skripsi*. S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.